

Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong pada Media Online Tempo.co

Wafda Izzati Hasanah¹; Mustiawan²; Titin Setiawati³

¹²³Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia
wafdaizzati091999@gmail.com¹; mustiawan@uhamka.ac.id²;
titin.setiawati@uhamka.ac.id³

ABSTRACT

This research examines the framing of news coverage on the sugar import corruption case involving Tom Lembong on Tempo.co online media. The case attracted public attention because it involved a former Minister of Trade for the 2015-2016 period with allegations of state losses reaching Rp 400 billion related to the issuance of raw crystal sugar import permits. The research aims to analyze how Tempo.co framed the news coverage of the case through the perspectives it built. The research method uses a qualitative descriptive approach with Robert N. Entman's framing analysis model consisting of four elements: Problem Definition, Diagnosis of Causes, Moral Judgment, and Treatment Recommendation. Research data was obtained from 10 online news articles from Tempo.co during the period of October 29 to November 15, 2024. The results show that Tempo.co tends to take a critical position towards the determination of suspects by the Attorney General's Office by questioning the political motives behind the case. The media framed the case as a more complex issue by highlighting the need for investigation of all trade ministers from the 2015-2023 period, emphasizing the importance of a fair and professional legal process, and encouraging transparency in handling the case. Tempo.co's framing reflects the media's role as a democratic watchdog that criticizes government actions and public institutions to provide a more comprehensive view to society.

Keywords: media framing, corruption case, Tom Lembong, Tempo.co, Entman analysis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji framing pemberitaan kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong pada media online Tempo.co. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 400 miliar terkait pemberian izin impor gula kristal mentah. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana Tempo.co membingkai pemberitaan kasus tersebut melalui perspektif yang dibangun. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Robert N. Entman. Data penelitian diperoleh dari 10 pemberitaan Tempo.co periode 29 Oktober sampai 15 November 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo.co cenderung mengambil posisi kritis terhadap penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dengan mempertanyakan motif politik di balik kasus tersebut. Media ini membingkai kasus sebagai permasalahan yang lebih kompleks dengan menyoroti perlunya penyelidikan terhadap semua menteri perdagangan periode 2015-2023, menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan profesional, serta mendorong transparansi dalam penanganan kasus. Framing Tempo.co mencerminkan peran media sebagai pengawas demokrasi yang mengkritisi tindakan pemerintah dan institusi publik untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

Kata Kunci: *framing* media, kasus korupsi, Tom Lembong, Tempo.co, analisis Entman

PENDAHULUAN

Belakangan ini publik diramaikan oleh pemberitaan mengenai dugaan kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Tri Lembong atau yang biasa dikenal Tom Lembong pada Jumat 29 Oktober 2024 lalu. Kasus ini berakar dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Tom Lembong selama masa jabatannya pada periode 2015-2016, diduga menyalahgunakan wewenang dengan memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton dan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 400 miliar. Korupsi adalah perilaku yang melanggar norma yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara memanfaatkan atau menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan (Arum et al., 2023). Kasus korupsi merupakan masalah kompleks yang tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum. Sebagai salah satu bentuk penyimpangan serius, korupsi sering kali menjadi fokus utama pemberitaan media, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Perkara ini menjadi sorotan publik bukan hanya karena melibatkan seorang tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai ekonom berintegritas dan mantan pejabat tinggi pemerintah, tetapi juga karena menyangkut kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Kasus Tom Lembong ini membuka kembali perdebatan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan sektor pangan dan (Shabrina, 2024).

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, memiliki dinamika media yang sangat beragam. Kebebasan pers yang cukup luas memberikan ruang bagi media untuk mengkritisi berbagai isu. Media tidak sekadar melaporkan fakta, melainkan turut mengonstruksi pemahaman masyarakat tentang kompleksitas korupsi. Pemberitaan mengenai kasus korupsi seperti ini, media massa memainkan peran penting sebagai instrumen pengawasan dan pembentuk opini publik (Putri & Pratiwi, 2022).

Pemberitaan dalam sebuah media tidak hanya persoalan isu dan realitas penting di masyarakat. Isu dan realitas yang telah di beritakan terlebih dahulu melalui *gatekeeper*. Penjaga gerbang informasi (*gatekeeper*) memberikan otoritas bagi media untuk menentukan isu mana yang layak diberitakan dan bagaimana isu tersebut disampaikan kepada khalayak. Pada konteks ini, peran *gatekeeper* diemban oleh pihak redaksi, editor, serta jurnalis (Ardi La et al., 2021). Penentuan isu, cara penyampaian pesan atau cara pandang mengungkap realitas dalam kajian ilmu komunikasi dikenal dengan *framing*. *Framing* adalah pembingkai sebuah peristiwa yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Leliana et al., 2021; Siregar & Qurniawati, 2022).

Di era modern ini *framing* menjadi alat yang sangat kuat bagi media untuk membentuk narasi tertentu. *Framing*, sebagaimana dipahami dalam studi komunikasi adalah cara media memilih, menonjolkan, atau menyembunyikan elemen-elemen

tertentu dalam suatu peristiwa untuk membentuk persepsi khalayak (Santibeng, 2023). Proses *framing* ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemilihan kata hingga struktur narasi yang digunakan dalam berita. Dengan *framing*, media dapat memengaruhi cara pembaca mendefinisikan suatu masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menilai moralitasnya, hingga menentukan solusi yang dianggap tepat (Rizki, 2022).

Kajian mengenai *framing* dalam pemberitaan bukanlah hal baru dalam studi komunikasi. Seperti halnya studi *framing* pemberitaan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 yang menunjukkan bahwa Koran.tempo.co cenderung membingkai pemerintah sebagai pihak yang tidak siap dalam menangani pandemi, dengan fokus pada keraguan terhadap kebijakan yang diambil (Sofian & Niken 2021). Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana *framing* dapat digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Framing juga bisa digunakan untuk melihat bagaimana sebuah media menarasikan sebuah isu atau realitas dalam pemberitaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nursitawati & Suseno yang menganalisis *framing* pemberitaan di media *online* Times Indonesia dan Tempo.co tentang kebijakan Presiden Jokowi. Penelitian ini menjelaskan bahwa ada perbedaan pemberitaan oleh kedua media tersebut yaitu Times Indonesia cenderung mendukung kebijakan pemerintah tanpa banyak memberikan ruang untuk kritik, sementara Tempo.co berusaha menjaga objektivitas namun tetap memberikan narasi kritis terhadap kebijakan Presiden (Nursitawati & Suseno (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa *framing* media dapat menciptakan perbedaan yang signifikan dalam cara pembaca memahami dan merespons suatu isu, tergantung pada bagaimana informasi disusun dan disajikan.

Framing ini bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menentukan bagaimana peristiwa atau fenomena dilihat oleh audiens. Pada konteks pemberitaan kasus korupsi impor gula Tom Lembong, teori *framing* menjadi alat untuk mengeksplorasi bagaimana media *online* seperti Tempo.co menyusun narasi kasus ini dengan memilih elemen-elemen tertentu dari peristiwa dan menyembunyikan atau mengabaikan aspek lainnya. Pemberitaan tentang kasus korupsi tidak hanya berfungsi untuk mengungkap fakta, tetapi juga untuk memobilisasi opini publik dalam mendukung atau menolak kebijakan tertentu (Akbar et al., 2024). Melalui mekanisme pemberitaannya, cara media massa mengonstruksi berita tentang kasus korupsi impor gula Tom Lembong akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut dan figur politik yang terlibat.

Namun, terdapat gap dalam permasalahan tentang bagaimana *framing* media digital di Indonesia, khususnya dalam pemberitaan kasus-kasus korupsi dan sikap publik dalam dunia digital. Pemberitaan dalam media *online* dapat lebih bebas dalam melakukan pemberitaan dan dapat menyebar secara cepat. Permasalahannya adalah sikap Netizen juga sulit untuk diprediksi dan kemudahan memberikan komentar yang dapat mempengaruhi sebuah pemberitaan. Seperti halnya media *online* Tempo.co sering kali lebih bebas dalam memberikan sudut pandang, namun kadang-kadang juga rentan pada dinamika politik, ekonomi, dan tekanan publik melalui komentar atau dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan.

Studi ini berfokus pada fenomena pemberitaan kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia, pada media *online* Tempo.co. Kasus ini telah menarik perhatian publik dan media, memunculkan perdebatan mengenai bagaimana media mengonstruksi pemberitaan seputar isu korupsi. *Framing* pemberitaan ini memiliki dampak besar terhadap persepsi publik, kebijakan pemerintah, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, teori *framing* menjadi relevan untuk memahami bagaimana media memilih, menyoroti, dan memberikan makna terhadap fakta-fakta yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Boghdan dan Taylor, metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna mendalam di balik teks berita, fokus pada proses pemaknaan, dan memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas *framing* yang dilakukan media. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dalam buku Metodologi Penelitian yang ditulis oleh Nashrullah dkk. (2023) dijelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak sekadar mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang konstruksi media terhadap peristiwa. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif membantu peneliti untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Tempo.co membingkai pemberitaan kasus korupsi impor gula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberitaan media massa, terutama media *online*, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik terhadap isu-isu sensitif, seperti kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong menjadi topik pemberitaan yang mendapatkan perhatian luas di *Tempo.co*. Penelitian ini menganalisis *framing* pemberitaan tersebut dengan menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman, yang berfokus pada empat elemen kunci, yaitu Definisi Permasalahan (*Define Problems*), Diagnosis Penyebab Masalah (*Diagnose Causes*), Penilaian Moral (*Make Moral Judgement*), dan Rekomendasi Penyelesaian (*Treatment Recommendation*). Peneliti menganalisis sepuluh berita online, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana *Tempo.co* membingkai pemberitaan kasus ini melalui pengidentifikasian masalah, penyebabnya, penilaian moral terhadap pelaku, serta solusi yang ditawarkan dalam pemberitaan tersebut, yang pada akhirnya membentuk persepsi publik terhadap kasus korupsi ini.

Tabel 1. Framing pemberitaan kasus korupsi impor gula Tom Lembong di Tempo.co

<i>Headline</i>	<i>Define Problems</i>	<i>Diagnose Causes</i>	<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Treatment Recommendation</i>
Kejagung Klaim Penetapan Tersangka Tom Lembong Bukan Politisasi (29/10/24)	Kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong sebagai mantan Menteri Perdagangan	Pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP dilakukan tidak sesuai prosedur, yakni tanpa rapat koordinasi dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	Kejaksanaan menekankan bahwa mereka bekerja secara profesional dengan mengikuti prosedur yang berlaku tanpa tebang pilih dalam menetapkan tersangka	-
Kejagung Belum Kantongi Bukti Aliran Dana ke Tom Lembong dalam Kasus Impor Gula (30/10/24)	Fokus pada penelusuran aliran dana kerugian negara Rp 400 miliar dalam kasus impor gula dan belum ada bukti keterlibatan Tom Lembong dalam aliran dana tersebut	Kerugian negara terjadi karena keuntungan yang seharusnya diterima PT PPI justru dinikmati oleh delapan perusahaan penerima kuota impor, sementara Tom Lembong ditetapkan sebagai	Kejaksanaan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses hukum dengan memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti	-

		tersangka dalam kapasitasnya sebagai regulator		
Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula, Kejangung Diminta Periksa Semua Menteri Perdagangan Era 2015-2023 (30/10/24)	Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula dianggap belum cukup, perlu pemeriksaan terhadap semua Menteri Perdagangan periode 2015-2023	Tom Lembong hanya menjabat sebagai menteri pada 2015-2016, sementara kasus impor gula yang baru disidik setelah selang waktu 9 tahun mencakup periode 2015-2023 dengan empat menteri berbeda yang turut menjabat selama rentang waktu tersebut	Kejaksaan Agung perlu bersikap "fair dan serius" dalam mengusut kasus ini dengan memeriksa semua menteri yang pernah menjabat	Semua menteri perdagangan periode 2015-2023 harus diperiksa sebagai saksi dan diusut keterlibatannya
KPK Siap Bantu Kejaksaan Agung Telusuri Aset-aset Tom Lembong dari Data LHKPN (31/10/24)	KPK menawarkan bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk penelusuran aset Tom Lembong melalui data LHKPN	Status Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula semakin disorot karena data LHKPN Tom	-	KPK akan menyediakan data LHKPN Tom Lembong jika diminta serta akan mengecek kembali laporan LHKPN tersebut bersama

		Lembong yang mencatat harta Rp 101 miliar tanpa mencantumkan kepemilikan rumah, tanah, dan kendaraan		Kejaksaan Agung
Impor Gula Berlangsung 2015 - 2023, Kejagung Fokus Pada Periode 2015-2016 Saat Tom Lembong Jadi Mendag (31/10/24)	Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan eks Menteri Perdagangan Tom Lembong dengan fokus pada periode 2015-2016, meskipun impor gula berlangsung hingga 2023.	Tom Lembong menerbitkan peraturan terkait impor gula kristal mentah pada periode 2015-2016, dimana dalam kasus ini adanya keterlibatan pihak swasta, yakni PT PPI melalui Charles Sitorus	-	Kejagung membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan bila ada penyimpangan di luar periode Tom Lembong dan penyidikan akan terus dilakukan secara maraton terhadap pihak-pihak terkait
Beri Izin Impor Gula tanpa Persetujuan, Pengacara Tom Lembong: Terlalu Naif Menko dan Presiden Tak Tahu (4/11/24)	Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemberian izin impor gula kristal	Kebijakan impor yang dikeluarkan tanpa persetujuan rapat koordinasi dan belum adanya bukti kuat tentang kerugian	Pengacara menilai tuduhan "mengada-ada" dan penetapan tersangka "terlalu dini", serta ada kekhawatir	Seharusnya jika ada kesalahan kebijakan, dilakukan evaluasi di masa itu atau pemberhentian menteri, bukan langsung ke ranah pidana untuk

	mentah 105 ribu ton tanpa melalui persetujuan rapat koordinasi dengan kementerian terkait	negara (actual loss) menjadi isu utama dalam permasalahan ini	an bahwa kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi para menteri yang sedang menjabat	kebijakan yang sudah berlalu lama
Daftar Menteri Perdagangan yang Lakukan Impor Gula Lebih Banyak dari Tom Lembong (4/11/24)	Kasus dugaan suap impor gula yang menjerat Tom Lembong sebagai tersangka dengan dugaan kerugian negara Rp 400 miliar yang terkait pemberian izin impor gula pada swasta saat kondisi surplus	Tom Lembong memberikan izin impor kepada pihak swasta, PT Angels Products tanpa koordinasi dengan instansi lain dan menyalahi aturan karena seharusnya hanya BUMN yang diperbolehk an melakukan impor.	Menteri- menteri perdaganga n lain juga melakukan impor dalam jumlah lebih besar, tetapi ada kejanggala n dalam kasus ini karena kerugian Rp 400 miliar bukanlah kerugian riil melainkan proyeksi keuntungan jika impor dilakukan BUMN	-
Satu Pekan Jadi Tahanan Kejagung, Tom Lembong Masih Bingung Salahnya di Mana (5/11/2024)	Tom Lembong sebagai tahanan kasus dugaan	Ketidajelas an pemahaman atas tuduhan yang diberikan	Tom Lembong digambark an sebagai tersangka yang	Kemungkinan untuk Tom Lembong menjadi <i>justice collaborator</i> , meskipun

	korupsi impor gula masih belum memahami kesalahannya dan merasa kebingungan atas tuduhan yang diberikan	kepada Tom Lembong	“tegar” menghadap i masalah ini meskipun kondisi kesehatan tom lembong membutuh kan konsultasi dokter, namun ia tetap kooperatif dalam proses pemeriksaan	belum ada keputusan
Kuasa Hukum Sebut Kejaksaan Agung Salah Data soal Tom Lembong Beri Izin Impor Gula saat Surplus (5/11/24)	Bantahan kuasa hukum Tom Lembong terhadap klaim Kejaksaan Agung tentang pemberian izin impor gula saat surplus, dengan adanya ketidakakur atan data yang digunakan Kejaksaan Agung	Terdapat perbedaan data/interpretasi antara kuasa hukum dan Kejaksaan Agung tentang kondisi surplus gula, dengan Kejaksaan Agung sebagai aktor utama yang dianggap memberikan data yang salah.	-	Kuasa hukum meminta Kejaksaan Agung untuk membuka informasi ke publik tentang data yang mereka miliki
Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong, Kejangung	Kasus korupsi impor gula	Kebijakan Tom Lembong	Ada penilaian moral	1. Penyelidikan difokuskan pada periode

Berpeluang Periksa Semua Mendag Era Jokowi (15/11/24)	yang berpotensi melibatkan lebih banyak pejabat, dengan kemungkinan perluasan penyelidikan ke semua menteri perdagangan era Jokowi	yang memberikan izin impor gula 105rb ton saat kondisi surplus tanpa melalui rapat koordinasi dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	implisit bahwa tindakan pemberian izin impor tanpa koordinasi proper adalah tindakan yang salah dan menyebabkan kerugian negara Rp 400 miliar menjadi penekanan aspek moral dari tindakan tersebut	2015-2016 terlebih dahulu sebelum memperluas ke periode lainnya dan perlunya pembuktian lebih lanjut sebelum memeriksa menteri-menteri lainnya
---	--	--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Definisi Permasalahan (*Define Problems*)

Framing tidak hanya sekadar tentang menyampaikan fakta atau peristiwa, tetapi juga tentang bagaimana fakta-fakta tersebut dikategorikan dan diberi makna. Menurut Entman, proses *framing* dimulai dengan mendefinisikan permasalahan maksudnya adalah cara media menentukan apa yang menjadi fokus utama dalam suatu peristiwa atau isu. Definisi masalah berkaitan dengan bagaimana media memutuskan masalah mana yang harus disorot dan apa yang perlu ditekankan. Ini adalah langkah pertama dalam *framing*, yang mencakup keputusan tentang narasi yang akan dikembangkan (Selasdi, 2021; Sofian & Niken, 2021). Seperti halnya dengan pemberitaan kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong.

Berdasarkan pemberitaan Tempo.co, kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong didefinisikan sebagai persoalan hukum yang kompleks dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 400 miliar. Masalah ini diposisikan sebagai kasus yang memerlukan penyelidikan menyeluruh, tidak hanya terfokus pada periode Tom Lembong (2015-2016), tetapi juga berpotensi meluas ke seluruh periode impor gula 2015-2023. Media membingkai kasus ini sebagai masalah yang lebih besar dari sekadar penetapan tersangka tunggal, dengan sorotan khusus pada penelusuran aliran dana dan ketepatan pemberian izin impor.

Framing definisi permasalahan, Tempo.co cenderung melihat kasus korupsi impor gula Tom Lembong sebagai kasus yang memiliki dimensi politik, bukan

semata-mata kasus hukum. Hal ini juga ditegaskan oleh jurnalis Tempo.co yang saat itu bertugas langsung untuk meliput kasus penetapan Tom Lembong sebagai tersangka pada Oktober 2024, redaksi Tempo.co sendiri terkejut dan menduga adanya motif politik di balik kasus tersebut.

“...Ketika Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, itu kalau tidak salah tanggal 20-an Oktober, itu benar-benar sangat mendadak. Kita pun sebagai wartawan saat itu terkejut ketika Kejaksaan Agung mengundang kita untuk konferensi pers pengumuman soal tersangka korupsi impor gula. Di fase-fase itu kan lagi persiapan soal kampanye Pilkada. Ini dugaan kita sebagai media, terutama di Tempo, ketika penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, kita menduga ini ada semacam politisasi, karena pada saat itu lagi hangatnya Tom Lembong dan Anies membahas soal pembuatan partai baru...” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Frame yang dibangun oleh Tempo.co terlihat dari *headline-headline* berita yang cenderung mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka Tom Lembong, seperti *“Kejagung Klaim Penetapan Tersangka Tom Lembong Bukan Politisasi”* dan *“Kejagung Belum Kantongi Bukti Aliran Dana ke Tom Lembong dalam Kasus Impor Gula”*. Pemilihan kata *“klaim”* dan penekanan pada *“belum ada bukti”* menunjukkan bahwa Tempo.co tidak serta-merta menerima narasi yang dibangun oleh Kejaksaan Agung dan berusaha untuk memberikan sudut pandang yang lebih kritis.

Dari hasil analisis terhadap 10 pemberitaan, terlihat bahwa Tempo.co mendefinisikan masalah ini kasus korupsi yang memerlukan penelusuran mendalam tentang aliran dana dan ketepatan pemberian izin impor. Media ini juga membingkai kasus tersebut sebagai permasalahan yang lebih besar dari sekadar penetapan tersangka tunggal, dengan sorotan pada potensi keterlibatan pejabat-pejabat lain pada periode 2015-2023. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada jurnalis Tempo.co menegaskan bahwa kasus ini harus dilakukan proses peliputan secara kritis sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara benar, bagaimana proses hukumnya hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.

“Kita berusaha untuk kritisi apa iya Tom Lembong melakukan tindak pidana korupsi. Jadi berangkat dari sana, kita ingin mengulas atau menggali apakah benar yang disangkakan oleh Kejagung itu benar dilakukan oleh Tom Lembong.” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa Tempo.co memilih untuk mengambil posisi skeptis dan kritis terhadap penetapan tersangka Tom Lembong yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. *Framing* permasalahan yang dilakukan oleh Tempo.co itu adalah upaya untuk memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan kasus tersebut kepada masyarakat agar proses hukum di Indonesia tidak ditunggangi oleh kepentingan politik.

Diagnosis Penyebab Masalah (*Diagnose Causes*)

Setelah mendefinisikan masalah, langkah selanjutnya dalam *framing* adalah diagnosis penyebab yaitu bagaimana media memandang sumber atau akar dari masalah yang terjadi. Teori *framing* berpendapat bahwa media memilih penyebab masalah tertentu yang sesuai dengan agenda atau ideologi mereka (Selasdi, 2021; Sofian & Niken, 2021). Di sini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menginterpretasikan dan menganalisis apa yang menyebabkan masalah tersebut, seperti halnya yang dilakukan oleh Tempo.com.

Penyebab utama masalah ini didiagnosis sebagai pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada pihak swasta (PT AP) yang dilakukan tanpa prosedur yang sesuai. Spesifiknya, tidak adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menjadi akar permasalahan. Keuntungan yang seharusnya diterima PT PPI justru dinikmati oleh delapan perusahaan penerima kuota impor, dengan keterlibatan pihak swasta melalui Charles Sitorus. Pemberitaan juga menyoroti kebijakan impor yang dilakukan pada saat kondisi surplus, meskipun terdapat perdebatan mengenai akurasi data tersebut.

Namun, yang menarik adalah bagaimana Tempo.co mengangkat isu bahwa kasus tersebut tidak sesederhana yang digambarkan. Tempo.co mempertanyakan mengapa hanya Tom Lembong yang dijadikan tersangka, padahal kebijakan serupa juga dilakukan oleh menteri-menteri perdagangan lainnya selama periode 2015-2023. Hal ini terlihat dari *headline* “Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula, Kejagung Diminta Periksa Semua Menteri Perdagangan Era 2015-2023” dan “Daftar Menteri Perdagangan yang Lakukan Impor Gula Lebih Banyak dari Tom Lembong”. Hasil wawancara dengan jurnalis Tempo.co semakin memperkuat temuan ini.

“Ketika Kejagung bilang pihak-pihak yang terlibat ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan, lalu ada 10 perusahaan itu, kita menduga yang melakukan itu bukan hanya Tom. Maksudnya ada main call di sana ketika memutuskan bahwa kita impor gula, misalnya. Tapi itu tidak disebut oleh Kejagung atau tidak dikaitkan. Kita juga berusaha mendorong ke sana. Kenapa hanya Tom? Kenapa tidak menteri-menteri yang lain yang di periode itu juga sebenarnya mestinya terlibat?” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Media Tempo.co juga melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Sebenarnya analisis juga ya, kita menganalisis, riset juga. Waktu itu yang disebut sama Kejagung itu kan hanya Tom dan 10 perusahaan, terus kita mencari tahu apakah benar hanya mereka atau ada yang lain. Kita riset dari rentang waktu kasus yang dia sebutkan itu tahun 2014 atau 2015 sampai 2019. Nah itu kan ada pergantian menteri banyak, jadi kita riset. Apakah benar hanya Tom, padahal pada saat itu ada menteri-menteri lain yang juga ternyata mengeluarkan kebijakan yang sama seperti Tom.” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa Tempo.co tidak hanya menerima begitu saja narasi yang dibangun oleh Kejaksaan Agung, tetapi melakukan investigasi mandiri untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kasus tersebut. Media ini berusaha mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat dan konteks yang lebih luas dari kebijakan impor gula selama periode tersebut.

Penilaian Moral (*Make Moral Judgement*)

Menurut Entman adalah penilaian moral, yaitu bagaimana media memberikan nilai-nilai moral terkait dengan peristiwa yang diberitakan (Selasdi, 2021; Sofian & Niken, 2021). Pada *framing*, penilaian moral mencakup proses media untuk menyatakan apakah suatu tindakan atau kejadian itu benar atau salah, baik atau buruk, dapat diterima atau tidak. Penilaian moral ini bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek emosional dan ideologis. Media memberikan penilaian ini untuk membentuk opini publik dengan cara yang mempengaruhi moralitas audiens terhadap suatu isu. Seperti halnya Tempo.com dalam kasus korupsi impor gula Tom Lembong yang berusaha untuk membangun moralitas audiens dalam pemberitaannya.

Framing moral yang dibangun dalam pemberitaan menekankan pada profesionalisme dan keadilan dalam proses hukum. Kejaksaan digambarkan bekerja secara profesional tanpa tebang pilih, meskipun kuasa hukum Tom Lembong menganggap tuduhan tersebut "mengada-ada" dan penetapan tersangka "terlalu dini". Media juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam proses hukum dan kebutuhan akan sikap "*fair* dan serius" dalam mengusut kasus ini, terutama mengingat implikasinya yang bisa menjadi preseden buruk bagi para menteri yang sedang menjabat.

Melalui pemberitaannya, Tempo.co mendorong pentingnya proses hukum yang adil dan berimbang, serta menghindari politisasi kasus hukum. Dalam berita berjudul "*Kejagung Klaim Penetapan Tersangka Tom Lembong Bukan Politisasi*", Tempo.co secara implisit mempertanyakan klaim Kejagung tersebut dengan penggunaan kata "*klaim*" yang menunjukkan sikap skeptis. Sementara itu, dalam berita "*Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula, Kejagung Diminta Periksa Semua Menteri Perdagangan Era 2015-2023*", media ini mendorong pentingnya konsistensi dan keadilan dalam proses hukum. Berdasarkan wawancara dengan jurnalis Tempo.co, terungkap bahwa media ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai.

"Pesan moral, kita tuh kepingin penegakan hukum itu benar-benar sesuai, benar-benar adil untuk siapa pun, bukan hanya Tom Lembong. Mungkin dalam kasus ini, publik bisa menilai apakah penegakan hukum terhadap Tom itu adil atau tidak. Waktu itu ramai banget dan publik kayaknya juga ikut turut mengkritisi." (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Lebih lanjut, narasumber menekankan pentingnya ketepatan dalam penerapan hukum. Ia mengungkapkan bahwa:

“Untuk menetapkan orang sebagai tersangka, itu kan bukan main-main. Itu kan bisa merampas hak orang, merampas hak hidup orang untuk bebas, banyak hak-hak lain yang terampas setelah Tom ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hanya karena pandangan politik yang berbeda, kita bisa menjerat orang dengan hukum yang sebenarnya mungkin itu tidak pas.” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Selain itu, Tempo.co mempertanyakan ketepatan penggunaan instrumen hukum pidana khususnya undang-undang tindak pidana korupsi untuk menangani apa yang pada dasarnya mungkin hanya merupakan kesalahan kebijakan atau pelanggaran administratif. Perspektif ini mencerminkan penilaian moral yang mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan dan konsekuensi hukum yang dihadapi. Narasumber menjelaskan bahwa:

“Mungkin saja kebijakan itu salah, tapi apakah undang-undang yang dipakai untuk menjatuhkan dia, untuk menangkap dia, untuk menjerat si Tom, itu udah tepat atau belum. Nah, kita berpihaknya ke proses penegakan hukumnya itu sendiri. Penegakan hukumnya benar atau enggak, tepat atau tidak.” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Penilaian moral yang dibangun oleh Tempo.co juga menekankan pentingnya mengevaluasi kebijakan publik. Media ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan apakah kesalahan kebijakan semata-mata dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, terutama jika tidak ada bukti adanya keuntungan pribadi yang diperoleh.

“Kalau pun dia bersalah, mungkin kebijakan dia salah. Tapi kita tetap mengkritisi kenapa pakai Tipikor? Kenapa nggak pakai pelanggaran administrasi misalkan. Ya, mungkin saja kebijakan itu salah. Kita nggak memihak 100% juga maksudnya. Tetap ada porsi, mungkin Tom itu tetap juga bersalah. Mungkin ada salahnya juga. Tapi apakah undang-undang yang dipakai untuk menjatuhkan dia, untuk menangkap dia, untuk menjerat si Tom, itu udah tepat atau belum.” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa media ini memperingatkan bahwa menjerat pejabat publik dengan undang-undang tindak pidana korupsi atas dasar kebijakan yang kontroversial tanpa bukti konkret dapat menciptakan preseden berbahaya yang menghambat inovasi kebijakan dan keberanian dalam pengambilan keputusan publik di masa depan. Penilaian moral ini mencerminkan keprihatinan tentang keseimbangan antara akuntabilitas dan fleksibilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Rekomendasi Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)

Elemen terakhir dari *framing* adalah rekomendasi penyelesaian, yang mencakup bagaimana media menawarkan solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang telah didefinisikan dan dianalisis. Pada banyak kasus, media

tidak hanya menggambarkan masalah, tetapi juga memberikan saran atau rekomendasi tentang bagaimana masalah tersebut sebaiknya diatasi diberitakan (Selasdi, 2021; Sofian & Niken, 2021). Rekomendasi penyelesaian ini merupakan bagian dari proses agenda-setting dan policy advocacy dalam komunikasi massa. Media tidak hanya menginformasikan audiens tentang suatu isu, tetapi juga memandu mereka tentang tindakan apa yang seharusnya diambil.

Rekomendasi penyelesaian yang diajukan dalam pemberitaan mencakup beberapa aspek: pemeriksaan terhadap semua menteri perdagangan periode 2015-2023 sebagai saksi, penelusuran aset melalui data LHKPN oleh KPK, dan fokus penyelidikan pada periode 2015-2016 sebelum memperluas ke periode lainnya. Media juga menyarankan pentingnya keterbukaan informasi, termasuk permintaan Kejaksaan Agung untuk membuka data yang mereka miliki ke publik. Terdapat pula usulan untuk mempertimbangkan kemungkinan Tom Lembong menjadi *justice collaborator* dalam penyelesaian kasus ini.

Berdasarkan analisis terhadap 10 pemberitaan, berita yang berjudul “Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula, Kejagung Diminta Periksa Semua Menteri Perdagangan Era 2015-2023” secara eksplisit menyarankan agar Kejaksaan Agung memperluas penyelidikan ke semua menteri perdagangan yang pernah menjabat selama periode tersebut. Sementara itu, berita “KPK Siap Bantu Kejaksaan Agung Telusuri Aset-aset Tom Lembong dari Data LHKPN” menawarkan solusi berupa kolaborasi antar lembaga penegak hukum dalam penelusuran aset.

Dari hasil wawancara dengan jurnalis Tempo.co, terungkap bahwa media ini berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum yang berjalan. Narasumber mengungkapkan bahwa:

“Langkah Tempo, ya kita tetap memberitakan. Ini kan proses persidangan sekarang, kalau nggak salah. Persidangan Tom Lembong lagi berjalan di pengadilan tipikor. Kita tetap memberitakan sesuai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sesuai fakta yang ada di lapangan. Tapi tetap kita menggunakan perspektif itu tadi. Kita benar-benar menyoroti penegakkan hukumnya, benar nggak nih keputusan yang udah diambil hakim, misalkan ketika udah diputuskan? Benar nggak yang divonis itu sudah sesuai apa belum. Ya kita tetap berusaha menjaga supaya keputusan itu tetap adil untuk siapapun, termasuk Tom Lembong.” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Media Tempo.co menekankan pentingnya transparansi dan peran media dalam mengawal proses penyelesaian kasus.

“Peran media, ya tetap kritis aja sih. Tetap kritis, tetap tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh penegak hukum. Meskipun kita tahu lah media itu pasti tidak netral, pasti ada kecenderungan untuk berpihak ke siapapun yang kita anggap lemah. Lemah dalam arti ter subordinat kah atau posisinya tidak setara. Nah kita berusaha untuk menyuarakan orang-orang yang kita anggap perlu disetarakan atau dibantu. Ya itu peran-peran media di situ” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Pada berita “*Kuasa Hukum Sebut Kejaksaan Agung Salah Data soal Tom Lembong Beri Izin Impor Gula saat Surplus*”, media ini menyoroti pentingnya keterbukaan data dari pihak Kejaksaan Agung. Penelusuran mendalam terhadap fakta-fakta yang dikemukakan menjadi bagian penting dari rekomendasi penyelesaian yang diajukan oleh Tempo.co. Narasumber dari Tempo.co menyebutkan bahwa jika memang ada kesalahan dalam kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong, mungkin lebih tepat ditangani sebagai pelanggaran administratif daripada kasus korupsi.

“Kalau pun dia bersalah, mungkin kebijakan dia salah. Tapi kita tetap mengkritisi kenapa pakai Tipikor? Kenapa nggak pakai pelanggaran administrasi misalkan.” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Pada perkembangan kasus, Tempo.co mengangkat kemungkinan Tom Lembong menjadi *justice collaborator* sebagai salah satu solusi penyelesaian kasus. Hal ini tercermin dalam berita “*Satu Pekan Jadi Tahanan Kejaksaan, Tom Lembong Masih Bingung Salahnya di Mana*” yang membahas opsi tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana media tersebut berusaha menghadirkan berbagai perspektif dalam penyelesaian kasus.

Dari keseluruhan analisis *framing* pemberitaan kasus korupsi impor gula Tom Lembong oleh Tempo.co, terlihat bahwa media ini mengambil posisi yang cenderung kritis terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tempo.co berusaha menyajikan sisi lain dari kasus tersebut dengan menggali lebih dalam mengenai konteks kebijakan impor gula pada periode 2015-2023, keterlibatan pejabat-pejabat lain dan kesesuaian penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Narasumber dari Tempo.co mengakui bahwa terdapat kecenderungan media tersebut untuk membela posisi Tom Lembong, namun tetap berusaha menjaga objektivitas dalam pemberitaan. Ia menjelaskan bahwa:

“Meskipun kita melihatnya agak membela Tom Lembong, tapi kita tetap menjaga objektivitas atau menjaga jarak. Kita tetap, porsi pemberitaannya mungkin agak cenderung kita membela Tom. Mungkin dari tulisan-tulisan saya juga. Karena saya merasa ada yang janggal. Tapi untuk menjaga objektivitas, kita tetap memberikan porsi pemberitaan ke kejakung itu sesuai. Tidak dikurang-kurangi atau tidak dilebih-lebihkan. Apa adanya memang seperti itu. Cuma perspektif atau angle-nya saja yang kita tajamkan.” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Framing yang dilakukan oleh Tempo.co juga sangat dipengaruhi oleh konteks politik saat kasus ini muncul. Penetapan tersangka terhadap Tom Lembong yang dilakukan pada saat persiapan kampanye Pilkada dan keterlibatan Tom Lembong dalam diskusi pembentukan partai baru bersama Anies Baswedan menjadi faktor yang membuat Tempo.co mempertanyakan motif di balik penetapan tersangka tersebut. Selain itu, absennya bukti aliran dana yang mengarah ke Tom Lembong juga menjadi faktor penting dalam *framing* yang dilakukan oleh Tempo.co. “*Sampai saat*

ini kejangung juga nggak bisa ngasih buktinya apa,” tegas narasumber. Kasus korupsi konvensional biasanya melibatkan penerimaan keuntungan personal, namun dalam kasus Tom Lembong, aspek ini belum terungkap dengan jelas.

Proses penahanan yang dinilai janggal juga mendapat sorotan dari Tempo.co.

“Dan proses penahanannya juga janggal. Jadi kalau kamu baca, enggak dikasih kuasa hukum segala macam. Nah, gitu-gitu loh. Sebelumnya kan kejangung bukan cuma Tom saja, yang menangkap orang, menahan orang. Tapi ketika Tom kok beda, kita bisa menilai sendiri, publik juga bisa menilai, enggak dikasih kuasa hukum. Terus ketika ada media dihalang-halangi untuk ngomong.” (Sumber: Wawancara dengan jurnalis Tempo.co, Senin, 10 Maret 2025).

Melalui *framing* yang dilakukan, Tempo.co juga berusaha menghadirkan wacana publik mengenai batas antara kesalahan kebijakan dengan tindak pidana korupsi. Media ini mempertanyakan apakah kebijakan yang salah atau tidak tepat dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, terutama jika tidak ada bukti adanya keuntungan pribadi yang diperoleh. Dengan demikian, *framing* yang dilakukan oleh Tempo.co dalam pemberitaan kasus korupsi impor gula Tom Lembong tidak hanya mencerminkan perspektif media terhadap kasus tersebut, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kasus tersebut. Media ini berusaha menghadirkan berbagai perspektif dan mendorong pembaca untuk berpikir kritis mengenai kasus yang sedang berlangsung.

KESIMPULAN

Analisis *framing* terhadap pemberitaan kasus korupsi impor gula Tom Lembong oleh Tempo.co menunjukkan bahwa media ini mengambil posisi yang cenderung kritis terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Melalui empat elemen *framing* Robert N. Entman, Tempo.co membingkai kasus tersebut dengan mempertanyakan motif politik di balik penetapan tersangka, mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan impor gula periode 2015-2023, menekankan pentingnya proses hukum yang adil, dan mendorong penyelidikan yang lebih komprehensif.

Temuan dari analisis ini menunjukkan bahwa *framing* yang dilakukan oleh Tempo.co tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai jurnalistik seperti *cover both sides*, tetapi juga oleh konteks politik dan kecenderungan media untuk berpihak kepada yang dianggap ter subordinasi. Meskipun demikian, Tempo.co tetap berusaha menjaga objektivitas dengan memberikan porsi yang seimbang kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pada konteks yang lebih luas, *framing* pemberitaan kasus korupsi impor gula Tom Lembong oleh Tempo.co menunjukkan bagaimana media memainkan peran penting dalam mengonstruksi realitas sosial dan mempengaruhi wacana publik mengenai kasus-kasus korupsi. Melalui *framing*, media seperti Tempo.co tidak hanya melaporkan fakta-fakta yang terjadi, tetapi juga mengajak pembaca untuk memahami kasus tersebut dari perspektif tertentu dan mendorong untuk berpikir kritis.

Pada akhirnya, *framing* yang dilakukan oleh Tempo.co mencerminkan peran media sebagai anjing penjaga (*watchdog*) dalam demokrasi, yang mengawasi dan mengkritisi tindakan pemerintah dan institusi-institusi publik. Kasus Tom Lembong, Tempo.co berusaha menyoroti berbagai aspek yang mungkin tidak terungkap dalam narasi resmi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada publik mengenai kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. F., Nabilah, & Ramadhan, M. D. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo di Kompas.com. *Jurnal Jurnalistik Dan Media*, 2(2), 76–84.
- Ardi La, Y., Abdullah Zein, M., & Fachruddin, S. (2021). Fungsi Gatekeeper dalam Menentukan Penerbitan Berita LKBN Antara Sultra. *Convergence: Jurnal Online Jurnalistik*, 3(2), 14–26.
- Arum, A. S., Zahra, A., Inassabrina, F. D., Rahmawati, H. Y., & Ningsih, S. A. (2023). Peran Partai Politik terhadap Kader yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi E KTP. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.Mei2013>
- Indrawan, Nurlatief, M., & Musi, S. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kematian Jurnalis Metro TV Yodi Prabowo pada media Online Tempo.co. *Jurnalisa*, 7(November 2021), 233–244. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/view/27676/17136?_cf_chl_tk=JkPfdzeIbJrTahrqEyNQDnUceXQ4U0jZ244bqsJXki0-1725956116-0.0.1.1-4926
- Khoerunnisa, E. F. (2020). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN TENTANG KEBIJAKAN MENTERI HUKUM DAN HAM YASSONNA LAOLY BEBASKAN NARAPIDANA DI TENGAH WABAH COVID-19 PADA MEDIA TEMPO.CO. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Leliana, I., Herry, Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus. *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 2(2).
- Miqdarullah, M., & Musfialdy, M. (2020). Pemberitaan Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019 Di Media Online Tempo.Co. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 1(6), 430. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v2i1.9242>
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. UMSIDA PRESS. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Nursitawati, & Suseno, A. (2023). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN JOKOWI MINTA DIKRITIK DI MEDIA ONLINE TIMES INDONESIA DAN TEMPO.CO

(ANALISIS FRAMING BERITA TIMES INDONESIA DAN TEMPO.CO PERIODE FEBRUARI 2023). *INTERPRETASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 26–33.

- Purwaningrum, P. (2019). Analisis Framing Robert N. Entman Perbandingan Berita “Prabowo Minta Maaf Tentang Pidato Tampang Boyolali” Pada Media Online Detik.Com Da Merdeka.Com (07 November 2018). *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 6–20.
- Putri, I. R., & Pratiwi, E. (2022). Aktivisme digital dan pemanfaatan media baru sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat atas isu lingkungan. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(2), 231. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v8i2.3303>
- Rizki, M. A. (2022). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RANGKAIAN PROSES PERSIDANGAN KASUS RIZIEQ SHIHAB ANTARA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID PERIODE MARET 2021. *UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO*.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Santibeng, A. I. (2023). ANALISIS FRAMING KOMPAS.COM, VIVA.CO.ID DAN TEMPO.CO TENTANG PENETAPAN ANIES BASWEDAN SEBAGAI CAPRES OLEH PARTAI NASDEM. *UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG*, 28.
- Selasdi, R. (2021). Analisis Framing Robert N . Entman Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 Di Media Online Tribunpekanbaru . Com. *Universitas Islam Riau*.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokasi*, 4(2), 33–50.
- Shabrina, D. (2024). Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong, Kejagung Berpeluang Periksa Semua Mendag Era Jokowi. *Tempo.Com*, Diakses: 5 Desember 2024. <https://www.tempo.co/hukum/kasus-korupsi-impor-gula-tom-lembong-kejagung-berpeluang-periksa-semua-mendag-era-jokowi-1168681>
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.55985/jnmc.v1i1.1>
- SHELEMO, A. A. (2023). ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE TENTANG PEMBERITAAN PROGRAM FORMULA E GUBERNUR ANIES BASWEDAN. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Sofian, A., & Lestari, N. (2021). Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19. *COMMICAST*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.12928/commicast.v2i1.3150>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*,

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 4 (2025) 1448 - 1467 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v7i4.7579

1(1), 53-61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>